# LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI SANGATTA 662986





(0549) 23273



id.pn-sangatta.go.id

# PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

# **LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Prof. Dr. Wirjonoprodjodikoro, S.H No. 1 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta – Kutai Timur

#### KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II (Audited) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sangatta, 24 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,

Arini Widiastuti, S.IP. NIP. 197409182006042001

# **DAFTAR ISI**

Kata Pe	ngantar	i
Daftar Is	si	ii
Pernyat	aan Tanggung Jawab	iii
Ringkas	an	1
I.	Laporan Realisasi Anggaran	3
ΙΙ.	Neraca	4
III.	Laporan Operasional	6
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	8
٧.	Catatan atas Laporan Keuangan	9
	A. Penjelasan Umum	9
	B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
	C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
	D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	28
	E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	31
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	34
VI.	Lampiran - lampiran	37



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR PENGADILAN NEGERI SANGATTA

JI. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. No. 01
Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Telp., [0549] 23273 | Fax. [0549] 21324.

# PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Periode Semester I yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sangatta, 23 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,

Arini Widiastuti, S.IP. NIP 197409182006042001

#### RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Periode Semester I Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi:

#### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5,748,386 atau mencapai 88 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp6,522,000.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp2,106,567,756 atau mencapai 49 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp4,285,817,000.

#### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024.

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp7,803,780,273 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 35,856,100 Aset Tetap (neto) sebesar Rp7,767,924,173 Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp289,027,096 dan Rp7,514,753,177. Sehingga nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar 7,803,780,273

#### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp6,604,200 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2,485,050,235 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai

(2,478,446,035) Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 286 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (2,478,445,749).

#### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tahun 2024 adalah sebesar Rp7,892,379,556 dikurangi Defisit-LO sebesar (2,478,445,749) kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2,100,819,370. Penurunan ekuitas sebesar (377,626,379) sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp7,514,753,177.

#### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

# I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

#### PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN

# **UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**

30 Juni 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA: MAHKAMAH AGUNG 005

ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SANGATTA 662986

URAIAN		2024			2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
I. Pendapatan Perpajakan	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
1. Pajak Dalam Negeri	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
2. Pajak Perdagangan Internasional	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	6,522,000.	5,748,386.	(773,614.)	88	6,797,000.	3,295,200.	3,501,800.	48.
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
3. Pendapatan BLU	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,522,000.	5,748,386.	(773,614.)	88	6,797,000.	3,295,200.	3,501,800.	48.
III. Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	6,522,000.	5,748,386.	(773,614.)	88	6,797,000.	3,295,200.	3,501,800.	48.
B. Belanja Negara	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
I. Belanja Pemerintah Pusat	4,285,817,000.	2,106,567,756.	(2,179,249,244.)	49	4,219,245,000.	2,149,638,362.	2,069,606,638.	51.
1. Belanja Pegawai	3,075,804,000.	1,620,093,668.	(1,455,710,332.)	53	2,990,535,000.	1,605,561,194.	1,384,973,806.	54.

2. Belanja Barang	1,210,013,000.	486,474,088.	(723,538,912.)	40	1,228,710,000.	544,077,168.	684,632,832.	44.
3. Belanja Modal	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
5. Belanja Subsidi	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
6. Belanja Hibah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
7. Belanja Bantuan Sosial	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
8. Belanja Lain-lain	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
II. Transfer ke Daerah dan Dana JUNa	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
1. Transfer ke Daerah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
a. Dana Perimbangan	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
1. Dana Transfer Umum	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
a. Dana Bagi Hasil	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
b. Dana Alokasi Umum	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
2. Dana Transfer Khusus	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
b. Dana Insentif Daerah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
c. Dana Keistimewaan DIY	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
d. Dana Otonomi Khusus	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
2. Dana JUNa	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
3. Hibah Kepada Daerah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,285,817,000.	2,106,567,756.	(2,179,249,244.)	49	4,219,245,000.	2,149,638,362.	2,069,606,638.	51.
C. PEMBIAYAAN	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.

# II. NERACA

# PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

# **NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**

PER 30 Juni 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

#### **NERACA**

TINGKAT SATUAN KERJA PER 30 JUNI 2024 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI

: ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI

: ( 1600 ) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA

# : ( 662986 ) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

NAMA PERKIRAAN	JUML	JUMLAH		urunan)
		2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	35,000,000.	0	35,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	856,100.	0	856,100	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	856,100.	0	856,100	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	35,856,100.	0	35,856,100	0.00
ASET TETAP				
Tanah	3,279,400,000.	3,279,400,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,948,209,419.	2,948,209,419	0	0.00
Gedung dan Bangunan	4,873,641,500.	4,873,641,500	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	27,517,047.	27,517,047	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,360,843,793.)	(3,230,720,306)	(130,123,487)	4.03
JUMLAH ASET TETAP	7,767,924,173.	7,898,047,660	(130,123,487)	(1.65)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	4,900,000.	4,900,000	0	0.00
Aset Lain-lain	49,531,000.	49,531,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(54,431,000.)	(54,431,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0.	0	0	0.00
JUMLAH ASET	7,803,780,273.	7,898,047,660	(94,267,387)	(1.19)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	254,027,096.	5,668,104	248,358,992	4,381.69
Uang Muka dari KPPN	35,000,000.	0	35,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	289,027,096.	5,668,104	283,358,992	4,999.18
JUMLAH KEWAJIBAN	289,027,096.	5,668,104	283,358,992	4,999.18
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	7,514,753,177.	7,892,379,556	(377,626,379)	(4.78)
JUMLAH EKUITAS	7,514,753,177.	7,892,379,556	(377,626,379)	(4.78)
JUMLAH EKUITAS	7,514,753,177.	7,892,379,556	(377,626,379)	(4.78)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,803,780,273	7,898,047,660	(94,267,387)	(1.19)

#### III. LAPORAN OPERASIONAL

# PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

#### LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

# 30 Juni 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

#### **LAPORAN OPERASIONAL**

**TINGKAT SATUAN KERJA PER 30 JUNI 2024** (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : ( 1600 ) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA

: ( 662986 ) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
PENDAPATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pajak Penghasilan	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Cukai	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pajak Lainnya	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bea Masuk	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bea Keluar	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0.	0.	0.	0.
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Sumber Daya Alam	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0.	0.	0.	0.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,604,200.	3,844,400.	2,759,800.	71.788
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	6,604,200.	3,844,400.	2,759,800.	71.788
PENDAPATAN HIBAH	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan	6,604,200.	3,844,400.	2,759,800.	71.788
BEBAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
Beban Pegawai	1,811,760,040.	1,791,165,082.	20,594,958.	1.15
Beban Persediaan	13,073,500.	12,308,000.	765,500.	6.22
Beban Barang dan Jasa	319,017,192.	319,051,850.	(34,658.)	(0.011)
Beban Pemeliharaan	174,847,181.	200,941,123.	(26,093,942.)	(12.986)
Beban Perjalanan Dinas	36,228,835.	35,806,138.	422,697.	1.181
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0.	0.	0.	0.
Beban Bunga	0.	0.	0.	0.
Beban Subsidi	0.	0.	0.	0.
Beban Hibah	0.	0.	0.	0.
Beban Bantuan Sosial	0.	0.	0.	0.
Beban Penyusutan dan Amortisasi	130,123,487.	156,066,010.	(25,942,523.)	(16.623)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0.	0.	0.	0.
Beban Transfer	0.	0.	0.	0.
Beban Lain-Lain	0.	0.	0.	0.
JUMLAH BEBAN	2,485,050,235.	2,515,338,203.	(30,287,968.)	(1.204)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(2,478,446,035.)	(2,511,493,803.)	33,047,768.	(1.316)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	0.
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	0.
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	286.	0.	286.	0.
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	286.	0.	286.	0.
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	0.	0.	0.

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	286.	0.	286.	0.
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2,478,445,749.)	(2,511,493,803.)	33,048,054.	(1.316)
POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	0.
Beban Luar Biasa	0.	0.	0.	0.
POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	0.
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2,478,445,749.)	(2,511,493,803.)	33,048,054.	(1.316)

# IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

# PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

# **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

# **UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**

30 Juni 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

#### **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

TINGKAT SATUAN KERJA PER 30 JUNI 2024 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA

: ( 662986 ) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	7,892,379,556.	8,143,338,290.	(250,958,734.)	(3.08)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,478,445,749.)	(2,511,493,803.)	33,048,054.	(1.32)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0.	0.	0.	0.
PENYESUAIAN NILAI ASET	0.	0.	0.	0.
SELISIH REVALUASI ASET	0.	0.	0.	0.

KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0.	0.	0.	0.
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,100,819,370.	2,163,711,912.	(62,892,542.)	(2.91)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(377,626,379.)	(347,781,891.)	(29,844,488.)	8.58
EKUITAS AKHIR	7,514,753,177.	7,795,556,399.	(280,803,222.)	(3.6)

#### V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### A. PENJELASAN UMUM

# A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, sesuai Undangundang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Entitas berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H No. 01 Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Negeri Sangatta berkomitmen dengan visi Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut :

- 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparan badan peradilan.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
- 2. Peningkatan akJUNbilitas putusan hakim.
- 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelsaian perkara.
- 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
- 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

# A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sangatta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

#### A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

# A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Kebijakan Akuntansi

# A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

#### (1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

# Pendapatan-

#### (2) Pendapatan-LO

LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### Belanja

# (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Beban

#### (4) Beban

 Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat

berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

# Aset (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### Aset Lancar Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
  - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### Aset Tetap Aset Tetap

• Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau

#### 13

harga wajar.

- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah rupiah).
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
  - Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Air Kementerian Bangunan pada Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2015. Termasuk dalam ruang objek revaluasi lingkup adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2018 dan 2023. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk

- objek penilaian selain Tanah.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Piutang Jangka Panjang

# Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai

- atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### Aset Lainnya

#### **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat didentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan penggunaan operasional entitas.

#### Kewajiban

#### (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek
    - Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
    - Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

 Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### Ekuitas

#### (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

# Penyisihan Piutang Tak Tertagih

#### (8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
   Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal	0,5%
	jatuh tempo	
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat	10%
	Tagihan Pertama tidak dilakukan	
	pelunasan	
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat	50%
	Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal	100%
	Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan	
	peluanasan	
	2. Piutang telah diserahkan kepada	
	Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Penyusutan Aset Tetap

#### (9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Triwulan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Triwulan selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik	4 tahun
Modern)	

Implementasi Akuntansi

#### (10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas pada neraca per 30 Juni 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

#### B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Rp5,748,386

#### B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp5,748,386 atau 88 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp6,522,000 Pendapatan Pengadilan Negeri Sangatta terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN berupa pendapatan sewa rumah negara.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 30 Juni 2024

Uraian	30 Juni 2024					
ordian	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.			
Pendapatan dari	6,522,000	5,748,386.	88			
Pemanfaatan BMN						
(425131)						
Pendapatan Lain –	-	0	0			
lain (425911)						
Jumlah	6,522,000	5.748.386	88			

Realisasi pendapatan 30 Juni 2024 mengalami kenaikan dibandingkan 30 Juni 2023.

# Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	REALISASI	ALISASI REALISASI	
	30 Juni 2024	30 Juni 2023	(TURUN) %
Pendapatan dari	0	0	0,00
Pemanfaatan BMN			
(42304)			
Pendapatan Lain – lain	0	0	0,00
(425911)			
Pendapatan dari	5,748,386	3,295,200	40
Pemanfaatan BMN			
(425131)			
Penerimaan Kembali	0	0	0,00
Persekot / Uang Muka			
Gaji			
Jumlah	5,748,386	3.295.200	40

# B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp2,106,567,756

Realisasi belanja Pengadilan Negeri Sangatta pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp2,106,567,756 atau 49 persen dari anggaran belanja sebesar Rp4,285,817,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

	30 Juni 2024		
Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Pegawai	3,075,804,000	1,620,093,668	100
Belanja Barang	1,210,013,000	486,474,088	100
Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	4,285,817,000	2,106,567,756	41
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	4,285,817,000	2,106,567,756	41

Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	NAIK
		30 Juni 2024		30 Juni 2023	(TURU
					N) %
Belanja	3,075,804,000	1,620,093,668	2,990,535,000	1,605,561,194	(1)
Pegawai					
Belanja	1,210,013,000	486,474,088	1,228,710,000	544,077,168	(4)
Barang					
Belanja	0	0	0	0	(O)
Modal					
Jumlah	4,285,817,000	2,106,567,756	4,219,245,000	2,149,638,362	2

Belanja Pegawai Rp1,620,093,668

# B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1,620,093,668 dan Rp 1,605,561,194

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	REALISASI 30 JUN 2024	REALISASI 30 JUN 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	558,654,800	552,522,180	(3,81)
Belanja Pembulatan	9,860	11,469	(7,66)
Belanja Tunj. Suami / Istri	33,020,690	29,773,530	4,06
Belanja Tunj. Anak	9,469,216	8,835,202	2,88
Belanja Tunj. Struktural	12,160,000	9,710,000	6,86
Belanja Tunj. Fungsional	732,980,000	731,470,000	(0,01)
Belanja Tunj. Pph PNS	107,392,346	90,258,013	(8,73)
Belanja Tunj. Beras	27,302,340	28,243,800	(1,6)
Belanja Uang Makan	67,485,000	81,137,000	(5,79)
Belanja Tunj. Umum	5,470,000	8,800,000	(12,87)
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	66,150,000	64,800,000	5,37
Belanja Lembur	0	0	0,00
Jumlah Belanja Pegawai Kotor	1,620,094,252	1,605,561,194	(0,02)
Pengembalian Belanja Pegawai	584		0

Jumlah Belanja Pegawai	1,620,093,668	1,605,561,194	(1)
------------------------	---------------	---------------	-----

Belanja Barang Rp1,224,077,836

# B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2024 dan JUNtember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,224,077,836 dan Rp1,284,409,797

# Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 30 JUN 2024	REALISASI 30 JUN 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	274,788,200	280,588,365	1,17
Belanja Barang Persediaan	13,073,500	12,208,000	(0,71)
Belanja Jasa	2,518,872	5,558,542	(15,2)
Belanja Pemeliharaan	159,864,681	200,841,123	(8,94)
Belanja Barang Non Operasional	0	9,075,000	100
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	36,228,835	35,806,138	(6,36)
Jumlah Belanja Barang Kotor	486,474,088	544,077,168	0,05
Pengembalian Belanja Barang	0	0	
Jumlah Belanja Barang	486,474,088	544,077,168	(1,8)

Belanja Modal Rp.0

# B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2023 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	REALISASI 30 JUN 2024	REALISASI 30 JUN 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung	0	0	0
dan Bangunan			

Belanja Modal Peralatan	0	0	(100)
dan Mesin			
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	_
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

#### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.35,000,000

#### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp35,000,000 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
BPG 046 PENGADILAN	0	0
negeri sangatta		
653256629861000		
Uang Tunai	2,024,823	0
Kuitansi UP	32,975,177	0
Jumlah	35,000,000	0

#### Persediaan Rp. 0

#### C.2. Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau

untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Persediaan:

Persediaan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Barang Konsumsi	0	0
Jumlah	0	100.000

Tanah Rp3.279.400.000

#### C.3. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.279.400.00 dan Rp3.279.400.000.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang atas aset tetap tanah per 30 Juni 2024.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2024	3.279.400.000
Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 30 Juni 2024	3.279.400.000
Akumulasi penyusutan s.d. 30 Juni 2024	0
Nilai Buku per 30 Juni 2024	3.279.400.000

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	9.245 m2	Jl. Prof. Dr. Wirjonoprodjodikoro,	2.773.500.000
		SH No. 01 Sangatta	
2	700 m2	Jl. Soekarno Hatta Komp	505.900.000
		Perumahan Dewa Ruci Sangatta	
		3.279.400.000	

Peralatan dan Mesin Rp 2,948,209,419

#### C.4. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan

2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.948.209.419 dan Rp2.908.539.419

Tidak terdapat mutasi tambah berupa Hibah dan Transfer Masuk Peralatan dan Mesin - Intrakomptabel dan tidak terdapat mutasi kurang pada aset tetap peralatan dan mesin per 30 Juni 2024.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2024	0
Mutasi Tambah :	0
- Pembelian	0
- Hibah Masuk	0
- Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 30 Juni 2024	2,948,209,419
Akumulasi penyusutan s.d. 30 Juni 2024	0
Nilai Buku per 30 Juni 2024	2,948,209,419

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung Bangunan Rp4,873,641,500

#### C.5. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp4.873.641.500 dan sebesar Rp4.873.641.500

Tidak terdapat mutasi tambah berupa belanja modal Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan dan tidak terdapat mutasi kurang pada aset tetap gedung dan bangunan per 30 Juni 2023.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2024	4.873.641.500
Mutasi Tambah :	0
- Pembelian	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 30 Juni 2024	4.873.641.500
Akumulasi penyusutan s.d. 30 Juni 2024	0

	Nilai Buku per 30 Juni 2024	4.873.641.500
- 1		

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya Rp27.517.047

#### C.6. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp27.517.047 dan Rp. 27.517.047

Tidak Terdapat mutasi kurang pada aset tetap lainnya per 30 Juni 2024.

Mutasi transaksi terhadap Aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2024	0
Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 30 Juni 2024	27.517.047
Akumulasi penyusutan s.d. 30 Juni 2023	
Nilai Buku per 30 Juni 2024	27.517.047

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(3,360,843,793)

#### C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(3,360,843,793) dan Rp(3,230,720,306)

Aset Tak Berwujud Rp4.900.000

#### C.8. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.900.000 dan Rp4.900.000. Aset tak berwujud ini merupakan Antivirus Kaspersky dengan lisensi selama 2 (dua)

tahun.

Aset Lain-lain Rp49,531,000

#### C.9. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp49.531.000 dan Rp49.531.000 Aset lain-lain ini berasal dari BMN yang dihentikan penggunaannya dan saat ini sedang diajukan usulan permohonan penghapusan kepada Pengguna Barang.

Akumulasi Penyusutan/Amortisas i Aset Lainnya Rp54.431.000

#### C.10. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp54.431.000 dan Rp54.431.000.

Uang Muka dari KPPN Rp35,000,000

#### C.11. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 202 adalah masing-masing sebesar Rp35,000,000 dan Rp.0 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp254,027,096

#### C.12. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp254,027,096 dan Rp5,668,104 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Hibah yang belum disahkan <mark>Rp0</mark>

#### C.13. Hibah yang belum disahkan

Pada pelaporan Tahun 2024 Satker Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II tidak ada saldo hibah yang belum disahkan.

Ekuitas Rp7,514,753,177

#### C.14. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7,514,753,177 dan Rp 7,892,379,556 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp6.604.200

#### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6,604,200 dan Rp3,844,400 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 2023

Uraian	30 JUN 2024	30 JUN 2023
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	6,604,200	3,844,400
(Pemanfaatan dan		
Pemindahtanganan) serta		
Pendapatan dari Penjualan		
Jumlah	6,604,200	3,844,400

Beban Pegawai Rp1,811,760,040

# D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1,811,760,040 dan Rp1,791,165,082 Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

> Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	REALISASI 30 JUN 2024	REALISASI 30 JUN 2023
Beban Gaji Pokok PNS	633,001,080	623,932,880
Beban Pembulatan	10,612	12,948
Beban Tunj. Suami / Istri	37,130,200	33,653,020
Beban Tunj. Anak	10,773,510	9,953,926
Beban Tunj. Struktural	14,170,000	11,210,000
Beban Tunj. Fungsional	823,250,000	823,520,000
Beban Tunj. Pph PNS	115,916,878	98,814,508
Beban Tunj. Beras	30,995,760	31,864,800
Beban Uang Makan	63,177,000	72,888,000
Beban Tunj. Umum	6,385,000	9,715,000
Beban Tunj. Kemahalan Hakim	76,950,000	75,600,000
Beban Lembur	0	0
Beban Belanja Pegawai	1,811,700,040	1,791,165,082
Pengembalian Belanja Pegawai	584	
Jumlah Beban Belanja Pegawai	1,811,700,040	1,791,165,082

Beban Persediaan Rp13,073,500

#### D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp13,073,500 dan Rp 12,308,000Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang dan Jasa Rp 319,017,192

# D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp319,017,192 dan Rp 319,051,850 Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban Pemeliharaan Rp 174,847,181

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masingmasing sebesar Rp174,847,181 dan Rp200,941,123 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada dalam kondisi normal.

Beban Perjalanan DinasRp36,228,835

# D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp65,690,902 dan Rp35,806,138 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2023 dan 2024

Uraian Jenis Beban	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Beban Perjalanan Dinas	36,228,835	35,806,138
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Dalam Kota		
Jumlah	36,228,835	35,806,138

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 130,123,487

#### D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp130,123,487 dan 156,066,010. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi karena adanya penyusutan untuk aset tetap dan amortisasi untuk aset tak berwujud.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp286

#### D.8. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari

pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

# Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2023 dan 2024

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non		
Lancar		
Pendapatan Pelepasan Aset Non	0	0
Lancar		
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Jumlah Surplus (Defisit) Pelepasan Aset	0	0
Non Lancar		
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non		
Operasional Lainnya		
Pendapatan Dari Kegiatan Non	286	0
Operasional Lainnya		
Beban Dari Kegiatan Non	0	0
Operasional Lannya		
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan	0	0
Non Operasional Lainnya		
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan	286	0
Non Operasional		

#### E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp8,143,338,290

#### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8,143,338,290 dan Rp7,998,431,496

Defisit (2,511,493,803)

#### E.2. Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan JUNtember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(2,511,493,803) dan

## LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2024

Rp(2,562,772,654) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

#### E.3.

Penyesuaian Nilai Aset <mark>Rp0</mark>

### E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk Periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar RpO. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

#### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar RpO. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Jumlah	0

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

## E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar RpO dan RpO.

Selisih revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

## Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	0
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	0

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

## E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar RpO dan RpO. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

## Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Uraian	Nilai Koreksi (Rp)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non	0
Revaluasi	
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non	0
Revaluasi	
Jumlah	0

Koreksi Lain-Iain Rp0

## E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah RpO. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

## Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0

## LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2024

Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

Transaksi Antar Entitas Rp 2.100.819.370

### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2,100,819,370 dan Rp2,163,711,912.

Ekuitas Akhir Rp7,514,753,17 7

#### E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan JUNtember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7,514,753,177 dan Rp7,795,556,399

#### F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Triwulan lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

#### F.2. INFORMASI AKRUAL

Informasi akrual pada laporan keuangan per 30 Juni 2024 tidak terdapat Utang Kepada Pihak Ketiga.

## F.3. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I adalah:

 Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta 653256629861000 a.n.
 BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATTA 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0

#### F.4. REVISI DIPA

Hingga tanggal 30 Juni 2024, Pengadilan Negeri Sangatta melakukan Revisi DIPA sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian:

## LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2024

1. Revisi 1 pada tanggal 03 April 2024.

## F.5. RALAT SPM, SP2D, SSBP DAN SSPB

Hingga tanggal 30 Juni 2024, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II melakukan ralat SP2D sebanyak 1 kali. Hal itu disebabkan dikarenakan kesalahan akun potongan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Deskripsi							
Semula	0						
Potongan Akun 425999 sebesar 286	Potongan Akun 425911 sebesar 286						

#### F.6. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 55/PA/SK/XII/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya Tahun Anggaran 2024, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Negeri Sangatta dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anagaran 2024, sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : Arini Widiastuti, S.IP.

Pejabat Pembuat Komitmen : Arini Widiastuti, S.IP.

Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan : Muhamad SPM Rodansa, S.I.P.

Bendahara Pengeluaran : Yunita Padma

Dewi, A.Md., A.B.

# LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2024

Bendahara Penerima : Aisyah, S.H., M.H.

## F.7. PENGUNGKAPAN CAPAIAN RINCIAN OUTPUT

Penyusunan belanja Pemerintah Pusat yang dirinci menurut fungsi dilakukan untuk melakukan analisis, yaitu mengetahui fungsi-fungsi mana yang menyerap alokasi anggaran paling banyak maupun sedikit. Berikut Capaian Rincian Output pada Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2024:

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung RI (005)
Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi (01)

Satuan Kerja : (Pengadilan Negeri Sangatta (662986)

Fungsi : Ketertiban dan Keamanan (03)

Sub Fungsi : Peradilan (03.04)

Hasil Program

Program Dukungan Manajemen (005.01.WA)

: Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat

Banding dan Tingkat Pertama Peradilan Umum (005.01.WA)

Lokasi : Kalimantan Timur (16)

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1049	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama								
	1. Layanan Perkantoran	4,285,817,000	2,106,568,340	49,15%	1	1	Layanan	49.98%	
	Subtotal	4,285,817,000	2,106,568,340	49,15%	1	1	Layanan	49.98%	
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/DII)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	
	Total	4,285,817,000	2,106,568,340	49,15%	1	1	Layanan	49,98%	

# LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2024

# G. <u>LAMPIRAN – LAMPIRAN</u>



#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KPPN SAMARINDA

# HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN PADA SATKER 662986 SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	4,285,817,000	4,285,817,000	0
2	Belanja	2,106,568,340	2,106,568,340	0
3	Pengembalian Belanja	-584	-584	0
4	Estimasi Pendapatan	6,522,000	6,522,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	5,748,386	5,748,386	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	35,000,000	35,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	35,000,000	35,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 17-JUL-24



hal: 1 dari 1 halaman

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN **TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024** (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 005

MAHKAMAH AGUNG

**ESELON I** 

: 01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI

: 1600 : 662986 KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Kode Lap : LRA.P.E1.1

Tanggal : 25/07/24 11:11 AM

Halaman : 1

Prg ID

: lap\_lra\_pen\_akun\_satker

KODE	URAIAN	5071111010711711711	R	% REALISASI			
KODE	Lovinite Literatura		PENDAPATAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN		PENDAPATAN NETTO	PENDAPATAN	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3	
42 4251	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan						
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6,522,000	5,748,100	0	5,748,100	88.13	
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	6,522,000	5,748,100	0	5,748,100	88.13	
4259	Pendapatan Lain-Lain						
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	286	0	286	0	
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	286	0	286		
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	6,522,000	5,748,386	0	5,748,386	88.14	
	JUMLAH PENDAPATAN	6,522,000	5,748,386	0	5,748,386	88.14	

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA **TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

: KD

JENIS SATUAN KERJA

Kode Lap : LRA.B.S.2 **ESELON I** BADAN URUSAN ADMINISTRASI : 01 Tanggal : 25/07/24 11:11 AM

WILAYAH/PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 1600 Halaman : 1

PENGADILAN NEGERI SANGATTA SATUAN KERJA : 662986 : lap\_lra\_bel\_akun\_satker\_poc Prg ID

Tgl Data : 25/7/24 7:30 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN	ANGGARAN SETELAH REVISI		REALISASI BELANJA		%	SISA ANGGARAN
NODE	UKAIAN	SEMULA		BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	REALISASI ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1						
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,176,922,000	1,176,922,000	558,654,800	0	558,654,800	47.47	618,267,200
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21,000	21,000	9,860	584	9.276	46.95	11,724
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	80,112,000	80,112,000	33,020,690	0	33,020,690	41.22	47,091,310
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	21,999,000	21,999,000	9,469,216	ő	9,469,216	43.04	12,529,784
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	35,700,000	35,700,000	12,160,000	ا م	12,160,000	34.06	23,540,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,098,623,000	1,098,623,000	732,980,000	ő	732,980,000	66.72	365,643,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	196,139,000	196,139,000	107,392,346	Õ	107,392,346	54.75	88,746,654
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	58,606,000	58,606,000	27,302,340	ň	27,302,340	46.59	31,303,660
511129	Belanja Uang Makan PNS	236,016,000	236,016,000	67,485,000	o o	67,485,000	28.59	168,531,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	25,866,000	25,866,000	5,470,000	0	5,470,000	21.15	20,396,000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	145,800,000	145,800,000	66,150,000	ő	66,150,000	45.37	79,650,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,075,804,000	3,075,804,000	1,620,094,252	584	1,620,093,668	52.67	1,455,710,332
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	3,075,804,000	3,075,804,000	1,620,094,252	584	1,620,093,668	52.67	1,455,710,332
52	BELANJA BARANG			1	1			
5211	Belanja Barang Operasional	1						
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	542,646,000	544,621,000	257,131,200	0	257,131,200	47.21	287,489,800
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	12,000,000	3,897,000	ő	3,897,000	32.48	8,103,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	48,432,000	36,636,000	13,760,000	o o	13,760,000	37.56	22,876,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	603,078,000	593,257,000	274,788,200	0	274,788,200	46.32	318,468,800
5218	Belanja Barang Persediaan							,,
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	34,922,000	34,923,000	13,073,500	ol	13,073,500	37.44	21,849,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	34,922,000	34,923,000	13,073,500	0	13,073,500	37.44	21,849,500
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	6,000,000	6,000,000	698,172	0	698,172	11.64	5,301,828
522113	Belanja Langganan Air	12,000,000	12,000,000	1,820,700	ő	1,820,700	15.17	10,179,300
522141	Belanja Sewa	2,000,000	2,000,000	0	ō	0	0	2,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	20,000,000	20,000,000	2,518,872	0	2,518,872	12.59	17,481,128
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	238,104,000	238,085,000	102,626,750	0	102,626,750	43.11	135.458,250
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	69,000,000	69,000,000	16,671,000	ő	16,671,000	24.16	52,329,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	178,309,000	178,308,000	40,566,931	o l	40,566,931	22.75	137,741,069
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	485,413,000	485,393,000	159,864,681	0	159,864,681	32.94	325,528,319

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT SATUAN KERJA **UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.B.S.2 **ESELON I** : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI Tanggal : 25/07/24 11:11 AM

WILAYAH/PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 1600 Halaman : 2

SATUAN KERJA : 662986 PENGADILAN NEGERI SANGATTA Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker\_poc

JENIS SATUAN KERJA : KD Tgl Data : 25/7/24 7:30 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN	ANGGARAN		REALISASI BELANJA	%		
	URAIAN	SEMULA	SETELAH REVISI	BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66,600,000	76,440,000	36,228,835	0	36,228,835	47.4	40,211,165
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	66,600,000	76,440,000	36,228,835	0	36,228,835	47.4	40,211,165
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,210,013,000	1,210,013,000	486,474,088	0	486,474,088	40.2	723,538,912
	JUMLAH BELANJA	4,285,817,000	4,285,817,000	2,106,568,340	584	2,106,567,756	49.15	2,179,249,244

# NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## **TINGKAT SATUAN KERJA**

PER 30 JUNI 2024 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: (005) MAHKAMAH AGUNG

**UNIT ORGANISASI** 

: (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI

: (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA

: (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 25/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 25/07/24 11:10 AM

Halaman: 1

lap neraca percobaan kas satker poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,106,567,756
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	5,748,386	
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	5,748,100
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	286
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	558,654,800	
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9,860	
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	33,020,690	
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	9,469,216	
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12,160,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	732,980,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	107,392,346	
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	27,302,340	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	67,485,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	5,470,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	66,150,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	257,131,200	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,897,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	13,760,000	
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	13,073,500	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	698,172	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,820,700	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	102,626,750	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	16,671,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40,566,931	
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36,228,835	- 0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	584
		JUMLAH	2,112,316,726	2,112,316,726

**FINAL** 

Kab. Kutai Timur, 25 Juli 2024 Penanggung Jawab UAKPA Kuasa Pengguna Anggaran

# NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

# TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : ( 1600 ) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 25/07/24 6:24 AM

Tgl Cetak : 25/07/24 11:10 AM

Halaman : 1

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	35,000,000	
0.0	115212	Piutang Lainnya	856,100	
0.0	131111	Tanah	3,279,400,000	
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,948,209,419	
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,873,641,500	
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	27,517,047	
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,519,179,10
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	833,664,68
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	8,000,000
0.0	162151	Software	4,900,000	0,000,000
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	49,531,000	
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	49,531,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	4,900,000
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	196,779,919
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	57,247,17
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	35,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,106,567,756
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	5,748,386	
0.0	391111	Ekuitas	0	7,892,379,556
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6,604,200
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	286
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	633,001,080	
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	10,612	
3.0	511121	Beban Tunj, Suami/Istri PNS	37,130,200	
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	10,773,510	
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	14,170,000	
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	823,250,000	
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	115,916,878	
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	30,995,760	
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	63,177,000	
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	6,385,000	
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	76,950,000	
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	296,902,520	
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,414,000	
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	13,760,000	
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	708,172	
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,732,500	- (
3.0	522141	Beban Sewa	1,500,000	

# NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: (005) MAHKAMAH AGUNG

**UNIT ORGANISASI** 

: (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI

: ( 1600 ) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA

: (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 25/07/24 6:24 AM

Tgl Cetak : 25/07/24 11:10 AM

Halaman : 2

lap\_neraca percobaan akrual satker poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	111,674,250	
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	16,671,000	
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46,501,931	
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	36,228,835	
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	74,468,759	
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	55,654,728	(
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	13,073,500	
		JUMLAH	13,709,853,687	13,709,853,687

Keterangan:

**FINAL** 

Kab. Kutai Timur, 25 Juli 2024 Penanggung Jawab UAKPA Kuasa Pengguna Anggaran

## **NERACA**

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: (005) MAHKAMAH AGUNG

**UNIT ORGANISASI** 

: (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI

: ( 1600 ) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA

: (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 25/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 25/07/24 11:10 AM

Halaman : 1

			lap_neraca_satker_	_komparatif_poo
NAMA PERKIRAAN	JUMLA	Н	Kenaikan (Penu	runan)
TV WWY ENGINEERING	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET		***************************************		
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	35,000,000	0	35,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	856,100	0	856,100	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	856,100	0	856,100	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	35,856,100	0	35,856,100	
ASET TETAP				
Tanah	3,279,400,000	3,279,400,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,948,209,419	2,948,209,419	0	0.00
Gedung dan Bangunan	4,873,641,500	4,873,641,500	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	27,517,047	27,517,047	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,360,843,793)	(3,230,720,306)	(130,123,487)	4.03
JUMLAH ASET TETAP	7,767,924,173	7,898,047,660	(130,123,487)	(1.65)
ASET LAINNYA		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(100,120,101)	(1.03)
Aset Tak Berwujud	4,900,000	4,900,000	0	0.00
Aset Lain-lain	49,531,000	49,531,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(54,431,000)	(54,431,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	7,803,780,273	7,898,047,660	(94,267,387)	(1.19)
KEWAJIBAN				()
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	254,027,096	5,668,104	248,358,992	4,381.69
Uang Muka dari KPPN	35,000,000	0	35,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	289,027,096	5,668,104	283,358,992	4,999.18
JUMLAH KEWAJIBAN	289,027,096	5,668,104	283,358,992	4,999.18
EKUITAS			200,000,002	4,333.10
EKUITAS				
Ekuitas	7,514,753,177	7,892,379,556	(377,626,379)	(4.78)
JUMLAH EKUITAS	7,514,753,177	7,892,379,556	(377,626,379)	(4.78)
JUMLAH EKUITAS	7,514,753,177	7,892,379,556	(377,626,379)	(4.78)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,803,780,273	7,898,047,660	(94,267,387)	(1.19)



## **NERACA**

## **TINGKAT SATUAN KERJA**

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : ( 1600 ) KALIMANTAN TIMUR

Keterangan:

**FINAL** 

SATUAN KERJA : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 25/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 25/07/24 11:10 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

Kab. Kutai Timur, 25 Juli 2024 Penanggung Jawab UAKPA Kuasa Pengguna Anggaran

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA **UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024** (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: MAHKAMAH AGUNG 005

**ESELON I** 

: BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01

SATUAN KERJA

: PENGADILAN NEGERI SANGATTA 662986

Tgl Data : 25/07/24 6:24 AM

Tgl Cetak : 25/07/24 11:09 AM

Halaman : 1

lan Ira face satker new noc

		2024				2023		
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	
Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	
Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	6,522,000	5,748,386	(773,614)	88	6,797,000	3,295,200	3,501,800	4
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	o	0	0	
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,522,000	5,748,386	(773,614)	88	6,797,000	3,295,200	3,501,800	4
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	
umlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	6,522,000	5,748,386	(773,614)	88	6,797,000	3,295,200	3,501,800	4
. Belanja Negara	0	0	0	o	o	0	0	
I. Belanja Pemerintah Pusat	4,285,817,000	2,106,567,756	(2,179,249,244)	49	4,219,245,000	2,149,638,362	2,069,606,638	5
Belanja Pegawai	3,075,804,000	1,620,093,668	(1,455,710,332)	53	2,990,535,000	1,605,561,194	1,384,973,806	5
2. Belanja Barang	1,210,013,000	486,474,088	(723,538,912)	40	1,228,710,000	544,077,168	684,632,832	4
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	o	0	
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	o	0	0	0	o	0	
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	o	0	
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	o	0	0	
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	o	o	0	
. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	o	0	o	
1. Transfer ke Daerah	0	0	o	0	0	0	0	

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: MAHKAMAH AGUNG 005

**ESELON I** 

: BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01

SATUAN KERJA

: PENGADILAN NEGERI SANGATTA 662986

Tgl Data : 25/07/24 6:24 AM

Tgl Cetak : 25/07/24 11:09 AM

Halaman : 2

lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

		2024				2023		
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	o	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,285,817,000	2,106,567,756	(2,179,249,244)	49	4,219,245,000	2,149,638,362	2,069,606,638	51
C. PEMBIAYAAN	0	0	o	0	0	0	0	0

Keterangan:

FINAL

Kab. Kutai Timur, 25 Juli 2024 Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI

: ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI

: ( 1600 ) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA

: (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 25/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 25/07/24 11:09 AM

Halaman: 1

lap\_lpe\_satker\_poc

		lap_ipe_satker_boc				
2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)			
7,892,379,556	8,143,338,290	(250,958,734)	(3.08)			
(2,478,445,749)	(2,511,493,803)	33,048,054	(1.32)			
0	0	О	c			
0	o	0	c			
o	o	o	c			
0	0	o	c			
2,100,819,370	2,163,711,912	(62,892,542)	(2.91)			
(377,626,379)	(347,781,891)	(29,844,488)	8.58			
7,514,753,177	7,795,556,399	(280,803,222)	(3.6)			
	7,892,379,556 (2,478,445,749) 0 0 0 0 2,100,819,370 (377,626,379)	2024     2023       7,892,379,556     8,143,338,290       (2,478,445,749)     (2,511,493,803)       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       2,100,819,370     2,163,711,912       (377,626,379)     (347,781,891)	2024         2023         KENAIKAN/ PENURUNAN           7,892,379,556         8,143,338,290         (250,958,734)           (2,478,445,749)         (2,511,493,803)         33,048,054           0         0         0           0         0         0           0         0         0           0         0         0           0         0         0           0         0         0           0         0         0           0         0         0           0         0         0           0         0         0           0         0         0           0         0         0           0         0         0           0         0         0           0         0         0           0         0         0           0         0         0           0         0         0           2,163,711,912         (62,892,542)           (377,626,379)         (347,781,891)         (29,844,488)			

Keterangan:

FINAL

Kab. Kutal Timur, 25 Juli 2024 Penanggung Jawab UAKPA Kuasa Pengguna Anggaran

## LAPORAN OPERASIONAL

# TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: (005) MAHKAMAH AGUNG

**UNIT ORGANISASI** 

: (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI

: (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA

: (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 25/07/24 6:24 AM

Tgl Cetak : 25/07/24 11:08 AM

Halaman: 1

		lap_lo_	satker_poc	
URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	o	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	o	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	o	o	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	o	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	О	0	
Pendapatan Cukai	o	o	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	o	o	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	О	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	О	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	o	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	o	o	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,604,200	3,844,400	2,759,800	71.788
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	6,604,200	3,844,400	2,759,800	71.788
PENDAPATAN HIBAH	0	o	0	
Pendapatan Hibah	o	o	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	o	0	
Jumlah Pendapatan	6,604,200	3,844,400	2,759,800	71.788
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,811,760,040	1,791,165,082	20,594,958	1.15
Beban Persediaan	13,073,500	12,308,000	765,500	
Beban Barang dan Jasa	319,017,192	319,051,850	(34,658)	
Beban Pemeliharaan	174,847,181	200,941,123	(26,093,942)	
Beban Perjalanan Dinas	36,228,835	35,806,138	422,697	1.181
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	o	o	0	#68359565
Beban Bunga	o	0	0	

# LAPORAN OPERASIONAL

# TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: (005) MAHKAMAH AGUNG

**UNIT ORGANISASI** 

: (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI

: (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA

: (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 25/07/24 6:24 AM

Tgl Cetak : 25/07/24 11:08 AM

Halaman : 2

	lap_lo_	satker_poc		
URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	Charles Inches
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	130,123,487	156,066,010	(25,942,523)	(16.623)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,485,050,235	2,515,338,203	(30,287,968)	(1.204)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(2,478,446,035)	(2,511,493,803)	33,047,768	
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	О	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	o	o	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	o	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	o	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	286	o	286	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	286	0	286	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	О	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	286	О	286	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2,478,445,749)	(2,511,493,803)	33,048,054	(1.316)
POS LUAR BIASA	0	О	0	
Beban Luar Biasa	О	О	0	
POS LUAR BIASA	0	О	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2,478,445,749)	(2,511,493,803)	33,048,054	(1.316)

Keterangan:

FINAL

Kab. Kutai Timur, 25 Juli 2024 Penanggung Jawab UAKPA Kuasa Pengguna Anggaran